



Bahan Pegangan Tanggapan

Transformasi Ekonomi Desa: Menjembatani

Bukti Empiris dan Kebijakan Nasional

Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan
Kementerian PPN/ Bappenas

7 Juli 2026

Pembangunan Desa dan Pemanfaatan Dana Desa sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi

Investasi melalui Dana Desa terbukti secara empiris meningkatkan aktivitas ekonomi dan layanan publik.



Paper Cassidy et.al. → menemukan bahwa desentralisasi pengeluaran meningkatkan **intensitas cahaya malam (proxy pertumbuhan ekonomi) sebesar 12,1%** dan **indeks layanan publik sebesar 0,11 standar deviasi** di desa-desa perdesaan setelah satu dekade (2015-2025).

KONSENSUS LITERATUR EMPIRIS:



Fadhilah Putra (2018): Kontribusi positif BUMDes menekan pengangguran



Rahman, A. (2023): dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa baru dapat dirasakan dua dan tiga tahun mendatang setelah penyaluran dilakukan.



Hartojo et.al (2022): Dana Desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa tertinggal secara signifikan; Meskipun begitu Dampak nya berbeda-beda antar wilayah.

Some findings at the district level:

- **Roudo et. al (2024):** Improved road quality significantly strengthens local fiscal decentralization, particularly in Java
- **Roudo and Chalil (2016):** Minimum Service Standards (MSS) can reduce disparities in public service performance across districts, although fiscal capacity remains the key determinant of successful implementation.

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

UU SPPN (UU No. 25/2004) mengharuskan adanya konsistensi antara perencanaan tingkat nasional (RPJPN/RPJMN) hingga ke tingkat desa.

Awal Desentralisasi Fiskal (Input)

- **UU No. 6 Tahun 2014** tentang Desa disahkan, mengakui desa sebagai entitas pemerintahan dan kewenangan otonom dan sumber pendapatan tersendiri (Dana Desa).
- Sebelum adanya UU Desa, tata kelola desa diatur dalam kerangka UU Pemda (UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004) di mana desa diposisikan sebagai unit administratif yang sangat bergantung pada kabupaten

Peningkatan infrastruktur dan aktivitas ekonomi (*Output & Outcome*)

Riset menunjukkan terdapat sejumlah peningkatan infrastruktur jalan dan layanan dasar di desa. Secara ekonomi pun meningkatkan level ekonomi di desa, walau masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan.

Kesejahteraan dan Kemandirian (*Impact*)

Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan melalui kemandirian Desa

Form, Rational, and Unfinished Agenda of Decentralization

Roudo (2018, pp. 18 – 30)

Form of Decentralization:

Types of Decentralisation	Definition (Powers and authorities are given and transferred to...)	Examples
Administrative Decentralisation	Appointed body	Central government passes its authority to a Corporation
Political Decentralisation	Elected political representatives at the lower level	Central government decentralises power to local governments
Competitive Decentralisation	Another body outside the organization which is competitively selected	Central government transfers authorities to local authority through competitive tendering
Non-Competitive Decentralisation	Another body outside the organization which is directly appointed	Health authorities transfer power to health providers
Internal Decentralisation	Division inside the organization	Managers have flexibility and less scrutiny from the principal officer in spending specific money.
External Decentralisation (Devolution)	External bodies or organizations	Transfer authorities from local education units to grant-maintained schools.

Adapted from: Pollitt and Bouckaert (2011, pp. 101-106)

Three main rationales of Decentralization:

1. Avoiding conflict among regions
2. Preventing the dissatisfaction of local governments towards the central government
3. enhancing the quality of services

Unfinished agenda:

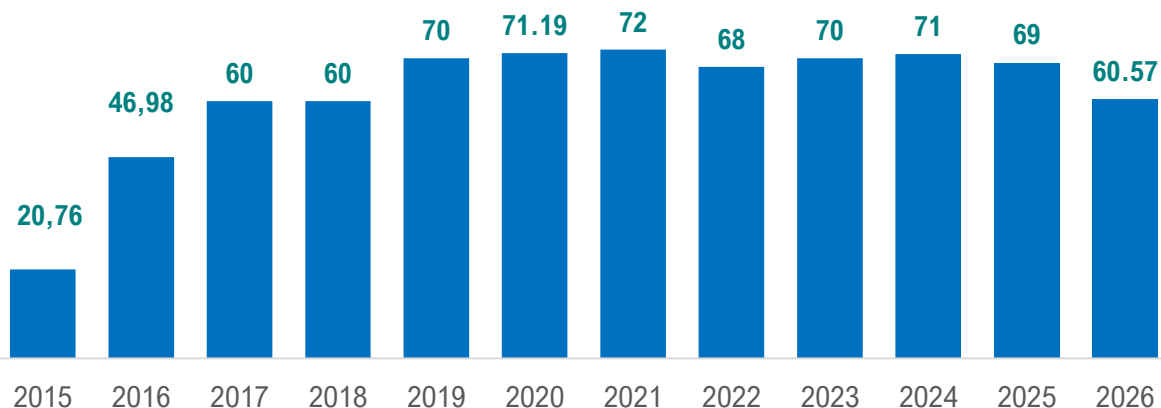
1. Fiscal disparities across regions lead to unequal public service quality.
2. high dependency of regions and local governments on the central government, particularly those with low fiscal capacity
3. Inefficiency in coordination between the central and local governments, as well as unclear tasks between different levels of governments

Dana Desa menjadi Salah Satu Instrumen Utama Pemerataan dan Penguatan Fondasi Pembangunan Wilayah

Selama lebih dari 10 tahun, Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah yang sangat besar

- Dana Desa merupakan bagian dari **APBN melalui Transfer ke Daerah**, dengan mandat pembangunan desa. (UU HKPD)
- **Tahun 2015 merupakan Implementasi pertama kali Dana Desa** dalam APBN senilai Rp 20,7 Triliun untuk 74.754 desa seluruh Indonesia, ditransfer dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota
- **Sejak 2020, Penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD).**
- Peran Dana Desa semakin strategis dalam mendukung **prioritas nasional dan transformasi pembangunan.**

**Perkembangan Jumlah Besaran Dana Desa 2015-2026
(dalam Triliun Rupiah)**



PERTANYAAN KEBIJAKAN KINI BERGESER

Dulu:

“Apakah Dana sudah tersalurkan?”

Sekarang:

“Apa dampaknya terhadap Pembangunan?”

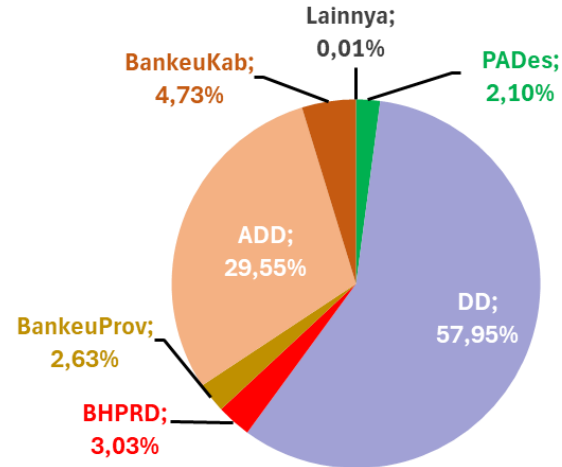
Lebih jauh lagi:

“Apakah Dana Desa menghasilkan *multiplier effect* bagi ekonomi daerah?”

Temuan empiris seperti ini dapat menjadi masukan **penting dalam penyempurnaan kebijakan Dana Desa** agar semakin produktif, adaptif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Isu Strategis: Keterbatasan Fiskal vs Karakteristik Wilayah

Proporsi Sumber Pendapatan APB Desa secara Nasional



Proporsi Pengalokasian Dana Desa Tahun 2026

PENGALOKASIAN DANA DESA 2026



Kebutuhan Pembangunan di Desa tidak sebanding dengan kapasitas fiskal di Desa

- Meski mendapat Dana Transfer dari Pusat dan Daerah, kebutuhan **pendanaan kegiatan Pembangunan di Desa bisa jadi masih belum dapat terpenuhi seluruhnya. Hal ini dapat disebabkan oleh:**
 - geomorfologi desa,
 - pola permukiman desa yang tersebar,
 - peningkatan jumlah masyarakat yang harus dilayani,
 - earmark penggunaan dana transfer,
 - Tidak memiliki akses ke sumber pendanaan lain (PADes, CSR, dll),
 - Peningkatan risiko iklim dan bencana,
 - serta perencanaan pembangunan desa yang belum terintegrasi dengan perencanaan daerah.
- Pada kasus desa urban, **Kapasitas fiskal Desa** tidak memenuhi kebutuhan karena **jumlah dan kepadatan penduduk tinggi** sehingga nilai penyediaan layanan per kapita semakin tinggi. Contoh: biaya sambungan air per SR berkisar 1,2-1,5 juta per SR. Semakin padat, maka jumlah SR akan bertambah.



Refleksi Kebijakan Terhadap Kajian Cassidy et.al

Kajian ini menjawab keraguan mengenai dampak jangka panjang desentralisasi; otonomi desa benar-benar menghasilkan nilai tambah nyata setelah 10 tahun.

1

Mekanisme Dampak Lebih Penting bagi Kebijakan

- **Memahami mekanisme dampak menjadi sama pentingnya dengan mengukur besarnya dampak.**
- Daya ungkit Belanja infrastruktur ≠ pemberdayaan ≠ bantuan langsung.
- Bukti adanya peningkatan aktivitas ekonomi merupakan temuan yang penting, namun **pemahaman mengenai bagaimana dampak tersebut terjadi** akan lebih bermanfaat bagi penyempurnaan desain kebijakan ke depan.

2

Dampak yang dihasilkan kemungkinan berbeda antar desa

- Pendekatan kebijakan yang adaptif
Karakteristik desa kemungkinan memengaruhi besarnya dampak ekonomi.
- **Kondisi infrastruktur, akses pasar, kapasitas pemerintah desa, serta struktur ekonomi lokal dapat menyebabkan dampak Dana Desa berbeda antarwilayah.**
- Kajian menunjukkan → peningkatan layanan publik paling signifikan terjadi di desa yang jauh dari ibu kota kabupaten, mendukung peran Dana Desa sebagai instrumen pemerataan

3

Kapasitas pemerintahan desa tetap menentukan

- Kajian memvalidasi bahwa kapasitas pemimpin adalah kunci keberhasilan desentralisasi
- **Dana Belanja yang Besar bukan berarti hasil besar**, kualitas dan komposisi belanja desa perlu jadi perhatian
- **Kapasitas pemerintah desa** dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan anggaran, **tetap menjadi prasyarat** agar belanja desa menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal.

Agenda yang belum terjawab

Diagnostic Radar Matrix		
Aspek	Terjawab	Unanswered
Klaim Kausalitas	Dana Desa terbukti memicu peningkatan aktivitas ekonomi	Belum menjelaskan lewat pintu mana pertumbuhan itu masuk. Apakah pertumbuhan didorong oleh investasi produktif, konsumsi sesaat, atau peningkatan produktivitas?
Komposisi Belanja	Layanan public terbukti meningkat (PAUD, jalan, dsb)	Kajian tidak merinci jenis belanja spesifik mana (infrastruktur vs pemberdayaan) yang menghasilkan <i>multiplier effect</i> terbesar per rupiahnya.
Dampak Fiskal Makro	Desa menerima aliran dana yang jauh lebih besar.	Efek substitusi. Apakah Dana Desa menambah uang beredar, atau hanya menggantikan anggaran dari Kabupaten/ Pusat/ Hibah?

Pertanyaan Kebijakan ke Depan (untuk Diskusi)

1. Bagaimana keberlanjutan dampak ini jika otonomi desa kembali dibatasi oleh kebijakan *earmarking* yang ketat (seperti mandat KDMP 2026)?
2. Mengapa pendidikan warga desa tidak berkorelasi dengan keuntungan desentralisasi, namun pendidikan kepala desa sangat menentukan? Hal ini mempertanyakan efektivitas partisipasi dan pengawasan oleh warga.
3. Berdasarkan data, intervensi jenis belanja apa yang paling optimal untuk didorong di tingkat desa guna mencapai target Desa Mandiri?



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

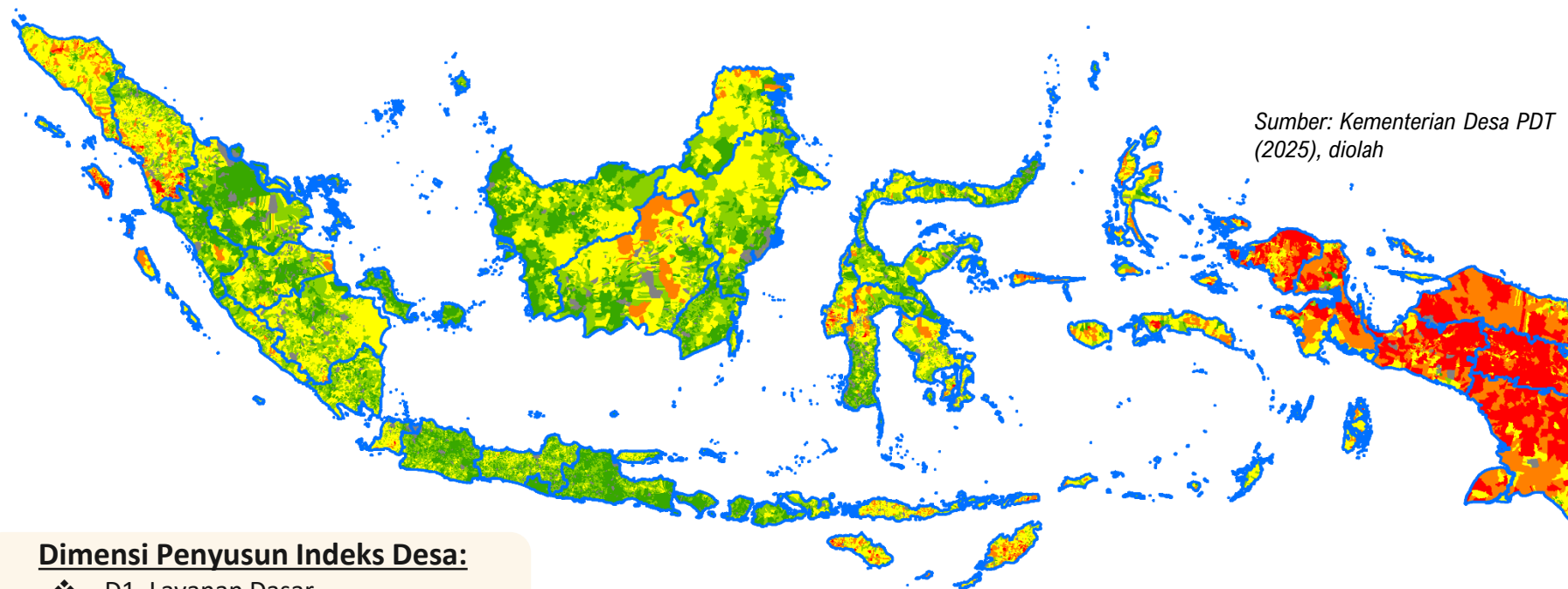
**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH



Dokumentasi Tim
Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
Kementerian PPN/Bappenas

CAPAIAN STATUS INDEKS DESA (2025)



Dimensi Penyusun Indeks Desa:

- ❖ D1. Layanan Dasar
- ❖ D2. Sosial
- ❖ D3. Ekonomi
- ❖ D4. Lingkungan
- ❖ D5. Aksesibilitas
- ❖ D6. Tata Kelola Pemerintahan Desa



Desa Mandiri
27,24%
(20.503 Desa)

Desa Maju
31,33%
(23.578 Desa)

Desa Berkembang
28,97%
(21.805 Desa)

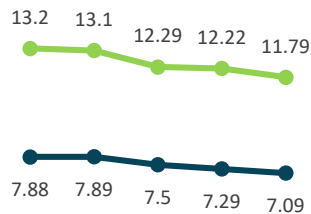
Desa Tertinggal
6,22%
(4.680 Desa)

Desa Sangat Tertinggal
6,24%
(4.695 Desa)

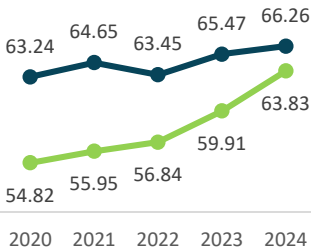
Dari total **75.265 Desa** di Indonesia, terdapat **9.375 (12,45%) Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal** yang kemudian digunakan untuk menentukan Lokasi Prioritas 3T.

ISU DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kemiskinan (%)

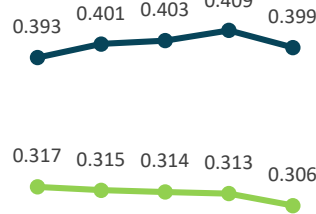


Rumah Layak (%)

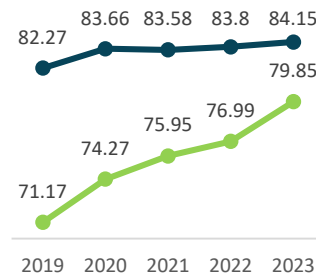


Sumber: BPS (2025)

Ketimpangan (Gini)

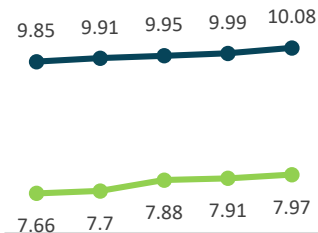


Sanitasi Dasar (%)

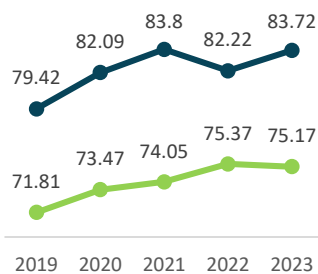


— Rural — Urban

Rerata Lama Sekolah



Faskes Dasar (%)



Potret Desa Hari Ini

1. Kemiskinan dan Kesenjangan Desa-Kota

- **Tingkat kemiskinan Perdesaan masih tinggi dan merata** (gini rasio rendah)
- Pemenuhan layanan dasar desa masih bervariasi, terdapat desa yang layanan dasar sudah mantap, namun juga terdapat desa yang layanan dasarnya memprihatinkan
- Secara agregat **kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang** dibandingkan layanan dasar perkotaan.

2. Pembangunan Ekonomi

- **Ekonomi rentan**: 93% sektor primer; rata-rata pendapatan sektoral terendah; (BPS)
- **Produksi pertanian** diproyeksi menurun 25% karena krisis iklim (BPS, diolah)

3. Sumber Daya Manusia

- **Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi di tingkat lokal** membuat desa sangat bergantung pada tenaga ahli dan inovasi eksternal.



Sanitasi terbuka di tepian air
(Bulungan, Kalimantan Utara)



Sumber Air Minum Tidak Aman*
(Balemo, Gorontalo)



Akses eksternal membutuhkan biaya tinggi
(Musi Banyuasin)



Kekeringan dan non-arable soil
(Sumbawa, NTT)



Bantuan Fasilitas tidak terkelola karena unit cost mahal* (Maluku Tengah)



TEMUAN LAPANGAN: DAMPAK PENYESUAIAN TKD TERHADAP LAYANAN DAN PRIORITAS DESA

Hasil Pemantauan Lapangan Dit. PDAT-Bappenas dan Pemantauan Media Massa

- **Temuan:** Desa di Indramayu hanya mampu mempertahankan operasional minimal (mis. posyandu), tanpa ekspansi layanan dan memberi insentif pada kader.
- **Makna kebijakan:** DD reguler mulai tidak cukup untuk *basic service floor* (kesehatan, sosial).
- **Risiko:** stagnasi bahkan penurunan kualitas layanan dasar

Layanan Dasar Tertekan



Temuan: Desa di Cirebon, Indramayu, Purwakarta mengurangi program disabilitas, kelompok rentan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Makna kebijakan: terjadi pergeseran alokasi anggaran desa akibat penurunan ruang fiskal desa.

Risiko: agenda inklusi & pemberdayaan ekonomi menjadi tidak berlanjut.

Prioritas Inklusif dan Ekonomi Lokal Tergeser



Temuan: Kasus Sukabumi—Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih sempat mangkrak, *progres* tidak sinkron, dan tidak transparan ke desa (meskipun di aset desa).

Makna kebijakan: lemahnya *ownership* dan koordinasi pusat–desa.

Risiko: rendahnya kepercayaan publik dan keberlanjutan operasional pasca konstruksi.

Disconnect Program Direktif (KDMP) dengan Desa



Temuan: Desa di Sumba Barat Daya berharap KDMP membuka akses pasar dan meningkatkan ekonomi lokal.

Makna kebijakan: ada kebutuhan nyata dari masyarakat desa terhadap intervensi ekonomi.

Catatan: gap antara ekspektasi vs desain implementasi perlu dijembatani.

Ekspektasi Tinggi terhadap Program Nasional



Temuan: Sumba Timur & Sumba Barat Daya masih mengalami *blankspot* listrik & internet; infrastruktur ada (tower), tapi tidak operasional.

Makna kebijakan: masalah bukan hanya *availability*, tapi *functionality*. Dana Desa tidak bisa bekerja optimal tanpa dukungan infrastruktur dasar.

Risiko: program digitalisasi desa tidak efektif.

Infrastruktur Dasar & Digital Masih Timpang



Temuan: Desa pelosok (Jawa & luar Jawa) masih membutuhkan jalan, air bersih, sanitasi.

Dimensi sosial: legitimasi kepala desa masih sangat terkait dengan *output* fisik.

Makna kebijakan: DD tetap menjadi tulang punggung *small-scale infrastructure*.

Kebutuhan Infrastruktur Fisik Masih Tinggi



Observasi: Banyak program tetap “terlaporkan berjalan” tapi dampaknya minimal karena keterbatasan anggaran.

Contoh kasus: Posyandu tetap berjalan, namun kegiatan terbatas (tanpa PMT tambahan, alat dan kader terbatas)

• **Makna:** indikator *output* tidak i cukup → perlu *shifting* ke *outcome*.

Risiko “Formalisasi Tanpa Dampak”



CONTOH PRAKTIK DESA YANG DAPAT MENGGERAKKAN EKONOMI LOKALNYA

1. Desa Pongkok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (BUMDes Tirta Mandiri)

- Transformasi dari desa termiskin menjadi paling kaya dan mandiri. PADes naik dari Rp80 juta/tahun (2001) menjadi Rp 5 - 10 miliar/tahun (2017-2025)
- Inovasi kelembagaan inklusif: saham internal BUMDes dibagikan ke seluruh KK. Warga berperan sebagai pegawai, mitra, sekaligus penerima dividen.
- Strategi adaptif melalui penguatan evaluasi pola ekonomi lama; jejaring eksternal melalui kemitraan dengan bank, konsultan, pemerintah daerah, dan akademisi (UGM); serta promosi kreatif lewat media sosial.
- Dampak bagi warga: Pendapatan rata-rata meningkat dari Rp600 ribu → lebih dari Rp2 juta/bulan; aset BUMDes melonjak dari Rp100 juta → Rp20 miliar.

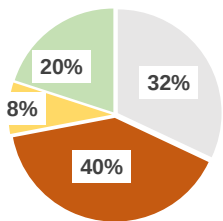
2. Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (BUMDes Sumber Sejahtera)

- Transformasi dari desa agraris menjadi desa wisata berbasis komunitas. PADes naik dari Rp162 juta/tahun (2018) menjadi Rp1,9 miliar/tahun (2019).
- Kepemimpinan inklusif: memadukan nilai sosiokultural lokal dengan manajemen modern; membuka ruang dialog sejak tahap perencanaan.
- Strategi adaptif: integrasi pariwisata dengan sektor pertanian; petani diberdayakan sebagai penyedia kuliner, pemandu wisata, dan akomodasi.
- Dampak bagi warga: menekan pengangguran, menarik pemuda kembali ke desa, serta meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi langsung dalam unit usaha Café Sawah dan ekowisata.

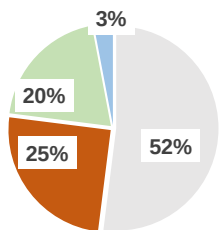


SEJAK TAHUN 2020, PENGGUNAAN DANA DESA TELAH DITENTUKAN MELALUI EARMARK, SALAH SATUNYA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DALAM BENTUK BLT-DESA.

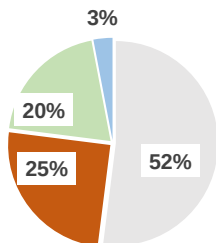
DD 2020 – 2022
Earmark BLT 40%



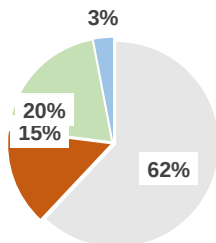
DD 2023
Earmark BLT 10-25%



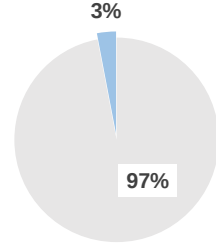
DD 2024
Earmark BLT 0-25%



DD 2025
Earmark BLT 0-15%



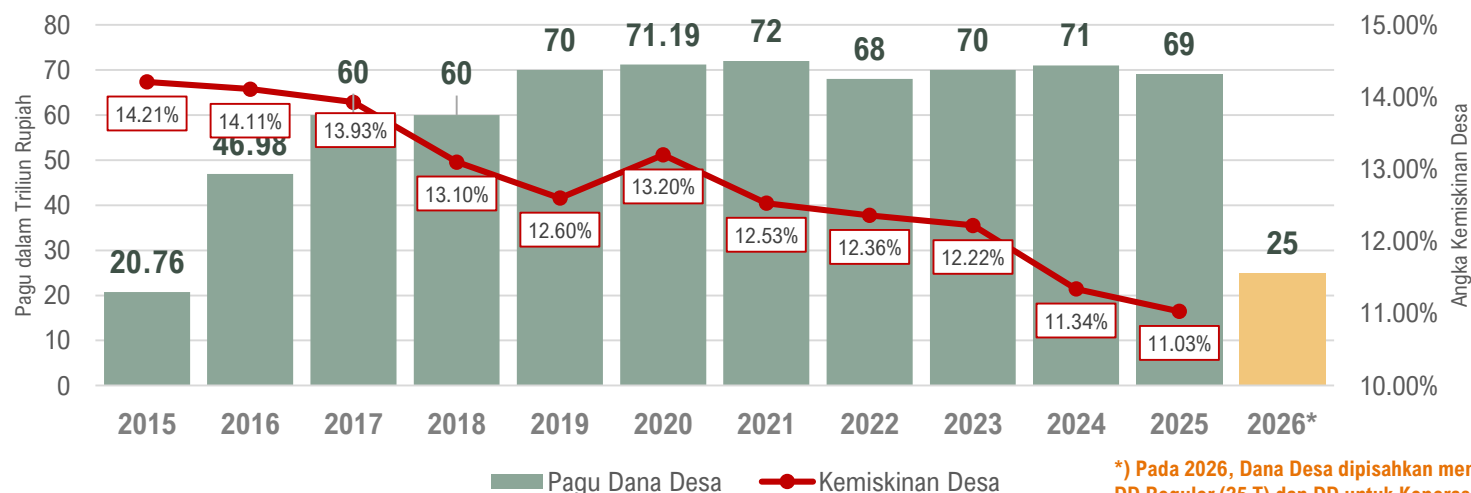
DD Reguler* 2026
Tanpa persentase BLT



*) Pada 2026, Dana Desa dipisahkan menjadi DD Reguler dan DD untuk Koperasi Desa Merah Putih

BLT Desa Penanganan Covid-19 Ketahanan Pangan Operasional Pemdes Ruang Gerak Desa

Perbandingan Dana Desa dengan Angka Kemiskinan Desa Tahun 2015 – 2025



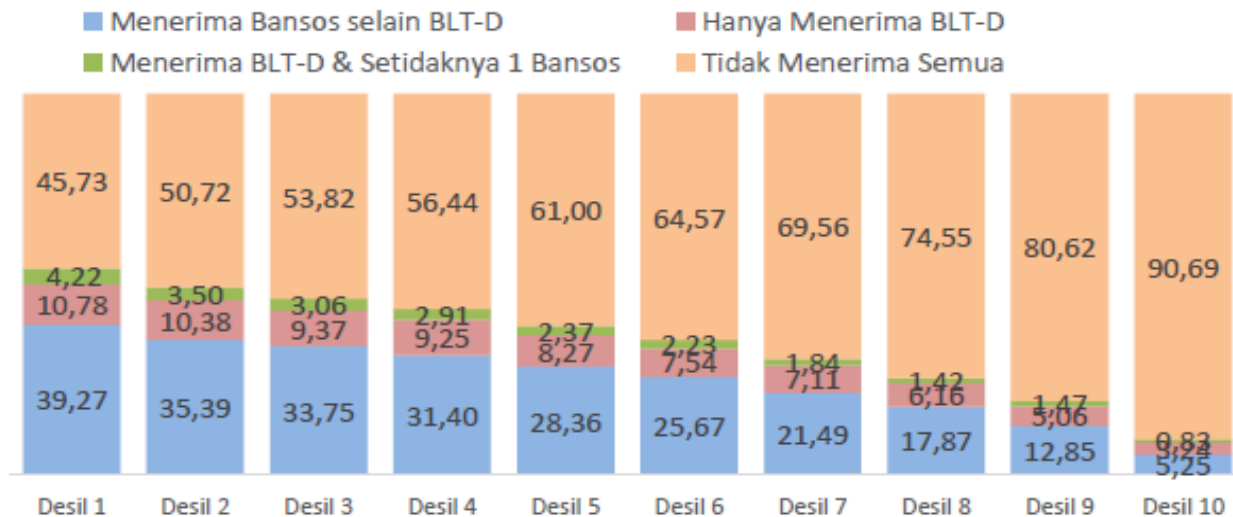
*) Pada 2026, Dana Desa dipisahkan menjadi DD Reguler (25 T) dan DD untuk Koperasi Desa Merah Putih (34,57 T)

- Terdapat tren penurunan angka kemiskinan perdesaan dari 14,21% di 2015 hingga 11,03% di tahun 2025
- Angka Kemiskinan Perdesaan sempat meningkat ke angka 13,20% di tahun 2020, Sejak tahun ini **terdapat earmark tertentu dari proporsi Dana Desa yang harus dialokasikan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa) yang ditentukan melalui musyawarah desa**
- Setiap tahun bertahap earmark BLT Desa dilepaskan seiring penurunan kemiskinan perdesaan, hal ini salah satunya untuk mengembalikan ruang Gerak Desa.
- Intervensi terhadap kasus kemiskinan ekstrem secara bertahap didorong bergeser dari *cash-transfer (BLT)* menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang lebih berdampak dalam jangka Panjang

Isu untuk diskusi: Meski Presiden mendorong optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem salah satunya melalui Dana Desa (Inpres 8/2025), namun saat ini terdapat tantangan Dimana pagu Dana Desa per Desa (regular) terbatas.

HASIL TINJAUAN TERHADAP BLT DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI DESA

Rumah Tangga Penerima Bansos dan BLT-D Tahun 2023



Sumber Data: Susenas BPS, diolah TNP2K (2024)

- Berdasarkan tinjauan TNP2K (2024), **BLT Desa yang berasal dari Dana Desa dapat menjangkau kelompok miskin dan rentan yang belum mendapatkan program bantuan sosial (Bansos) pusat dan daerah.**
- Tanpa BLT –Desa, peluang kelompok desil 1 untuk mendapatkan program hanya sekitar 30%.
- Pelaksanaan BLT-D dapat menjangkau *exclusion error* program bantuan sosial (khususnya kelompok desil bawah sebesar 9-10%)

Isu – Isu terkait BLT Desa

Pelaksanaan BLT Desa ini tidak tanpa cela, ada beberapa isu yang muncul, di antaranya:



Desa **kesulitan mencari atau menyeleksi** keluarga penerima manfaat yang benar-benar layak



Belum semua Desa mendapatkan data DTSEN yang dapat menjadi acuan awal penentuan KPM.



Pemanfaatan BLT Desa tidak efektif membantu mengentaskan kemiskinan karena **langsung dipakai habis**, (buruknya untuk konsumsi tersier seperti rokok)



Perlu memperkuat pemantauan kondisi terkini KPM dan **updating basis data secara berkala**



Adanya **konflik sosial** di Masyarakat mengenai penerima bantuan-bantuan pemerintah (Perlinsos Reguler dan Temporer)



Penurunan Besaran Dana Desa yang diterima setiap Desa

BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN DANA DESA DALAM DOKUMEN RPJMN 2025-2029: PENGGUNAAN TIDAK SEKEDAR PENYERAPAN ANGGARAN

Dana Desa merupakan **pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa** dengan tujuan **mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan Desa**. Arah kebijakan Dana Desa selama periode 2025 – 2029 sebagai berikut:



1. Mendukung kemandirian desa yang berkelanjutan sesuai prioritas kebijakan nasional, serta kewenangan desa, potensi dan karakteristik desa serta kawasan perdesaan melalui:

- Perencanaan, pembangunan, dan/atau pemeliharaan, infrastruktur dasar desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, rumah layak huni, serta konektivitas yang dilaksanakan mengutamakan keterlibatan masyarakat setempat dan bahan baku lokal;
- Penyediaan pelayanan dasar skala desa, antara lain sektor kesehatan, pendidikan serta elektrifikasi;
- Penanganan kemiskinan perdesaan melalui penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Penguatan desa yang berwawasan perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tanggap bencana;
- Percepatan implementasi digitalisasi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya;
- Mendorong transformasi ekonomi desa serta penguatan peran lembaga ekonomi desa; dan/atau
- Mendukung program ketahanan pangan yang berbasis kepada pemanfaatan sumber daya lokal Desa ;



2. Mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan keadilan dan keberpihakan, serta pemberian insentif dan disinsentif sesuai kinerja desa



3. Mengoptimalkan sinergisitas dukungan pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan sumber pendanaan lainnya;



4. Meningkatkan strategi dan kualitas perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa melalui penguatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga;



5. Mendukung implementasi sistem informasi berbasis elektronik yang saling terkoneksi sesuai dengan kewenangan untuk mendukung:

- Peningkatan kualitas data keuangan desa yang mencerminkan akuntabilitas dan tata kelola yang efektif, efisien, dan ekonomis; serta
- Peningkatan kualitas data non-keuangan desa yang mencerminkan kinerja desa.

Sesuai Perpres No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

“Karena tujuan akhirnya bukan membelanjakan Dana Desa, melainkan menciptakan nilai tambah.”

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DANA DESA 2027

dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan RKP Tahun 2027

A. Mengarahkan Pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan peran ekonomi lokal dengan fokus dan prioritas, diantaranya

- i. dukungan terhadap implementasi **program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)**;
- ii. mendukung program **swasembada pangan dan energi**;
- iii. **penguatan desa berketahanan iklim** dan tangguh bencana, termasuk mitigasi perubahan iklim dan **penanggulangan bencana**;
- iv. **penanganan kemiskinan ekstrem** melalui bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat yang mengacu kepada data Pemerintah;
- v. **perencanaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur** desa berbasis padat karya tunai desa dengan memanfaatkan bahan baku lokal dalam penyediaan air minum, sanitasi, **pengolahan sampah**, rumah layak huni, **digitalisasi**, dan **konektivitas** dalam kerangka permukiman terpadu.
- vi. mendorong transformasi ekonomi desa berdasarkan potensi dan karakteristik desa melalui dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa dan lembaga ekonomi desa lainnya;
- vii. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa; **dan/atau**
- viii. program sektor prioritas lainnya di desa .

B. Mendanai operasional pemerintah desa paling tinggi 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa per-desa, selain untuk Koperasi Desa Merah Putih;

C. meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa dilakukan melalui:

- i. peningkatan kualitas belanja barang dan jasa di desa dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
- ii. pemberian dukungan insentif kepada desa yang mendukung kebijakan nasional melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa;
- iii. memperkuat koordinasi dan mitigasi risiko kebijakan dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa;
- iv. meningkatkan keterpaduan dan interprobabilitas data keuangan desa dengan data non-keuangan desa

Keterangan Warna Teks:
Direktif Presiden
Prioritas RKP 2027



RAPID LITERATURE REVIEW (RLR)

No	Tahun	Penulis	Judul	Jurnal	Tujuan	Metode	Temuan	Saran Kebijakan
1	2023	Syamsul Bahri	Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat Desa di Indonesia	<i>Journal of Public Administration</i>	Mengidentifikasi dampak alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan desa dan perekonomian di Indonesia	Pendekatan Tinjauan literatur sistematis untuk menyelidiki dampak alokasi dana desa dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya	Pemanfaatan Dana Desa sukses memberikan dampak nyata pada layanan dasar dan aktivitas ekonomi perdesaan , namun pengelolaannya belum optimal akibat kendala tata kelola , keterbatasan kapasitas SDM, dan dinamika regulasi yang terjadi selama transisi kebijakan	Meningkatkan pengelolaan dana desa dengan manajemen yang efektif, keterlibatan masyarakat, serta transparansi dalam alokasi dan pemanfaatan dana desa untuk memaksimalkan dampaknya terhadap pembangunan desa dan ekonomi lokal di Indonesia. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek pembangunan.
2	2023	Affandi Rahman Halim dan Artika Taryani	Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap IDM di NTT	Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Kementkeu	Menjelaskan bagaimana pengaruh persentase penyaluran dana desa, persentase penyerapan atau penggunaan dana desa, dan kecepatan penyaluran dana desa terhadap IDM dengan lag waktu satu hingga tiga tahun	Regresi data seknder berupa dataset IDM dan dataset dana desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan <i>lag</i> waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM. Ini membuktikan bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa baru dapat dirasakan dua dan tiga tahun mendatang setelah penyaluran dilakukan.	Pertama, kebijakan penyaluran dana desa harus berkelanjutan dalam jangka panjang untuk dapat semakin meningkatkan status desa menjadi maju dan mandiri. Kedua, penggunaan dana desa perlu dioptimalkan untuk membiayai kebutuhan desa sesuai prioritas nasional. Desa juga perlu mengantisipasi dan mengatasi berbagai kendala di lapangan agar tidak ada dana yang tidak terpakai. Ketiga, kesiapan dan komitmen pemerintah desa, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat desa perlu terus ditingkatkan untuk makin mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa

RAPID LITERATURE REVIEW (RLR)

No	Tahun	Penulis	Judul	Jurnal	Tujuan	Metode	Temuan	Saran Kebijakan
3	2022	TNP2K	<i>Executive Summary: Improving Village Fiscal Productivity & Capacity to Accelerate Village Development</i>	-	Menilai sejauh mana produktivitas dan kapasitas fiskal desa termasuk penggunaan APBDesa berkontribusi pada percepatan Pembangunan Desa	Analisis statistic deskriptif, analisis kualitatif dan desk review regulasi	Terdapat ketidaksinkronan antara IDM dengan kewenangan Desa, produktivitas belanja desa rendah untuk peningkatan ekonomi Masyarakat , PADes cenderung menurun setelah UU Desa, Potensi Pengembangan Kawasan perdesaan cukup efektif, namun implementasi masih sangat rendah, Terdapat tantangan ganda untuk Desa di Daerah Tertinggal.	Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan: 1. Reformasi sistem pengukuran Pembangunan Desa 2. Meningkatkan produktivitas APBDesa untuk sektor produktif 3. Memperluas dan memperdalam sinergi antar desa dan dengan supradesa 4. Penguatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan 5. Mempertimbangkan afirmasi khusus untuk daerah tertinggal
4	2022	Nurlatifah Hartojo, Mohammad Iksan, Teguh Dartanto, Sudarno Sumanto	<i>A Growing Light in the Lagging Region in Indonesia: Impact of Village Fund on Rural Economic Growth</i>	Economies	Menilai pengaruh kausal Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi desa khususnya di daerah tertinggal di Indonesia	Proxy Pertumbuhan ekonomi dari <i>nighttime light dan Regression Discontinuity Design in Time (RDit)</i>	Dana Desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa tertinggal secara signifikan; Meskipun begitu Dampak nya berbeda-beda antar wilayah. Dampak paling besar dirasakan di Indonesia Timur dan paling rendah di Indonesia Barat. Alokasi seragam kurang efektif untuk mengejar ketertinggalan wilayah Timur	Rekomendasi kebijakan: 1. Meninjau ulang formula alokasi Dana Desa yang lebih berbasis kebutuhan, kesenjangan, dan potensi pertumbuhan 2. Penguatan intervensi Pembangunan desa di wilayah timur dan daerah tertinggal 3. Memperkuat kapasitas Desa dalam penggunaan Dana Desa
5	2018	Fadilah Putra, Hadi Prayitno, Nasrun Annahar, Dita Nurul Aini	<i>Evaluation of Village Fund Program in Indonesia</i>	-	Menguji ketercapaian target Pembangunan desa melalui instrument dana desa	Pendekatan menggunakan <i>Grounded Theory Research</i>	Keberadaan Dana Desa berkontribusi positif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan Tingkat ekonomi local Desa melalui BUMDes , meningkatkan infrastruktur ekonomi dan daya beli Masyarakat desa.	Perlu dilakukan penguatan implementasi model <i>pro-poor budgeting</i> di level desa mengingat belum dapat disimpulkannya penurunan kemiskinan yang disebabkan oleh Dana Desa